

TELAAH KRITIS REALISASI APBD KABUPATEN SUMBAWA

Ika Fitriyani^{1*}
Universitas Samawa
Sumbawa Besar/Indonesia
ikaekonomi@gmail.com

Muhammad Nur Fietroh²
Universitas Teknologi Sumbawa
Sumbawa Besar/Indonesia
m.nur.fietroh@uts.ac.id

ABSTRAK

Munculnya masalah/kendala realisasi anggaran yang masih timpang menunjukkan lemahnya penerapan dan perencanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah analisis pendapatan daerah, belanja daerah serta pengaruh pembelanjaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep teoritis dan perbandingan data time series realisasi APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sumbawa selama lima tahun mengalami fluktuatif. Rata-rata realisasi APBD masih tergolong sangat rendah yaitu berada di kisaran 0,00 – 10,00 %. Hal tersebut sejalan dengan masih minimnya kemampuan daerah kabupaten Sumbawa dalam menjalankan otonomi daerah terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, yaitu kemandirian daerah sebesar 17,25% dan derajat otonomi fiskal sebesar 10,47%. Inefisiensi anggaran belanja 102,96% selama 5 tahun berimbas pada tingginya anggaran yang diserap khususnya belanja bantuan keuangan yaitu berada di atas 50% dan peningkatan positif pada belanja modal. Oleh karena itu, tingginya pembelanjaan daerah harus sejalan dengan tingginya PDRB atau pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan jumlah rata-rata Kontribusi PAD yang sebesar 12,67% yang tergolong kurang maka pemerintah daerah kabupaten Sumbawa perlu melakukan langkah diantaranya pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas, penerimaan lain-lain serta dari hasil bukan pajak sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Kata Kunci : Realisasi APBD, analisis pertumbuhan, Rasio Keuangan dan PDRB

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi masalah polemik hampir di berbagai daerah. Ketimpangan target anggaran dengan realisasi anggaran menjadi salah satu lemahnya penerapan dan perencanaan anggaran dalam mengelola APBD. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yakni tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan serta bermanfaat untuk masyarakat. Harapan diterapkannya asas pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah agar anggaran yang sejatinya uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 23 UUD 1945 Hasil Amandemen ke4). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa APBD dengan tujuan untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak ke rakyat. Munculnya kelemahan dalam realisasi anggaran tersebut menjadi penyebab bahwa keuangan pemerintah daerah belum optimal dikelola dengan baik. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Susanto (2019) yang melakukan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian tentang “Telaah Kritis Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa”.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah/mengevaluasi lebih mendalam tentang APBD kabupaten Sumbawa khususnya dari sisi pendapatan daerah dan belanja daerah dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio kemandirian daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumbawa sehingga apakah ada perubahan struktur ekonomi atau tidak dari belanja daerah karena semakin besar belanja daerah akan semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah menelaah analisa pendapatan daerah, analisa belanja daerah serta menelaah pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dengan Menggunakan data kuantitatif melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun anggaran 2012-2019 melalui sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio keuangan dan regresi linier yang dijabarkan menggunakan persamaan di bawah ini.

Analisa Regresi Linier (Sugiyono, 2012).

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

1. Analisa Pertumbuhan APBD

$$R = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:
R= Rasio Pertumbuhan APBD
Pt = Total Pendapatan, Belanja, Surplus/deficit, pembiayaan tahun ke t
Pt-1 = Total Pendapatan, Belanja, Surplus/deficit, pembiayaan tahun ke t-1

Persentase (%) Kinerja Pertumbuhan	Kriteria Kinerja Pertumbuhan
0,00-10,00	Sangat rendah
11,00-20,00	Rendah
21,00-30,00	Sedang
> 30,00	Tinggi

Sumber: Mahmudi, 2012:96

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKD_t = \frac{PAD_t}{DP_t + LPYS_t}$$

Dimana:
RKDt = Rasio Kemandirian Daerah tahun t
PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun t
DPt = Dana Perimbangan daerah tahun t
LPYSt = Lain-lain pendapatan yang sah tahun t

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Kemandirian Keuangan Dearah (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif

Tinggi	75% - 100%	Delegatif
--------	------------	-----------

Sumber: Mahmudi, 2012: 101

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan daerah tahun t

Persentase Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber: Mahmudi, 2012:103

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil analisis data laporan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2015	1,307,113,124,030.40	13,20
2.	2016	1,526,355,151,256.80	16,77
3.	2017	1,675,057,372,641.27	9,74
4.	2018	1,604,617,445,655.24	(4,20)
5.	2019	1,782,120,347,895.91	11,06%
	Jumlah	7,895,263,441,479.62	35.62
	Rata-rata	1,579,052,688,295.92	7.12

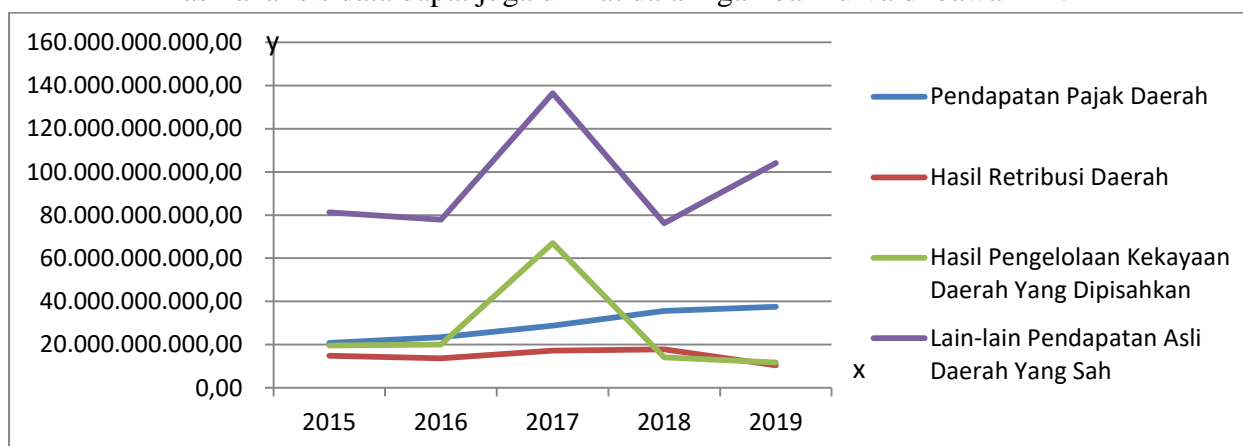
Sumber dari BPS Kab. Sumbawa, 2020

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2015	136,672,898,733.61	8,35
2.	2016	135,092,854,266.71	(1,15)
3.	2017	249,526,156,524.27	84,70
4.	2018	143,943,921,430.24	(42,31)
5.	2019	163,793,011,423.91	13,78
	Jumlah	829,028,842,378.74	63.37
	Rata-rata	165,805,768,475.75	12.67

Sumber dari BPS Kab.Sumbawa, 2020

Hasil analisis data dapat juga dilihat dalam gambar kurva di bawah ini.



Dana Perimbangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2015	916,583,889,182.00	8,45
2.	2016	1.114.408.750,000.45	21,58
3.	2017	1.204.288.145.000,86	8,06
4.	2018	1.194.041.315.627,00	(0,85)
5.	2019	1,314,892,538,873.00	10,12
Jumlah		2,231,476,428,055.00	47.36
Rata-rata		446,295,285,611.00	9.47

Sumber: BPS Kab Sumbawa, 2020.

Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

No. Tahun	Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Rp)	Pertumbuhan (%)	
1. 2015	253,856,336,114.79	38,44	
2. 2016	286,266,198,600.00	12,76	
3. 2017	52,329,376,508.00	(81,72)	
4. 2018	59,008,578,044.00	12,77	
5. 2019	104,003,836,788.43	76,25	
Jumlah		755,464,326,055.22	58.50
Rata-rata		151,092,865,211.04	11.70

Sumber: BPS Kab Sumbawa, 2020.

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan APBD Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun anggaran dari sisi pendapatan daerah mengalami fluktuatif. Rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan daerah sebesar Rp.7.895.263.441.479,62 atau 46,57%. Angka ini termasuk kriteria tinggi yaitu di atas 30%. (Mahmudi,2012). Namun jumlah anggaran yang bersumber dari PAD tergolong masih rendah yaitu kontribusi rata-rata sebesar 12,67%. Oleh karena itu, pmda perlu mengupayakan meningkatkan pemungutan dari pajak daerah, retribusi, penerimaan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah untung mendorong kestabilan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan Realisasi dana perimbangan rata-rata sebesar 63,37% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata 58,5% mengindikasikan bahwa daerah kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi mengandalkan sumber pendapatan ini karena mengingat jumlah PAD yang masih tergolong kurang dalam menutupi anggaran belanja.

**Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Dana Perimbangan	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria/Pola Hubungan
2015	136,672,898,733.61	916,583,889,182.00	253,856,336,114.79	11,67	Rendah sekali/Intruktif
2016	135,092,854,266.71	1.204.288.145,86	286,266,198,600.00	46,99	Rendah/Konsultatif
2017	249,526,156,524.27	1.204.288.145,86	52,329,376,508.00	4,57	Rendah sekali/instruktif
2018	143,943,921,430.24	1.194.041.315.627,00	59,008,578,044.00	11,48	Rendah sekali/intruktif
2019	163,793,011,423.91	1,314,892,538,873.00	104,003,836,788.43	11,54	Rendah sekali/intruktif

**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Rasio
2015	136,672,898,733.61	1,307,113,124,030.40	10,45	Kurang
2016	135,092,854,266.71	1,526,355,151,256.80	8,85	Sangat kurang
2017	249,526,156,524.27	1,675,057,372,641.27	14,89	Kurang
2018	143,943,921,430.24	1,604,617,445,655.24	8,97	Sangat kurang
2019	163,793,011,423.91	1,782,120,347,895.91	9,19	Sangat kurang

**Perkembangan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018**

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	PDRB (%)
2012	879.533.564.775,87	6,67
2013	944.772.324.097,41	6,44
2014	1.064.752.018.739,00	6,63
2015	1.329.968.305.103,51	6,42
2016	1.485.764.542.537,79	5,42
2017	1.730.576.904.223,74	6,86
2018	1.684.211.294.640,21	4,18

**Pengaruh Pembelanjaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Standar Deviasi Rata-Rata dan Observasi**

No	Variabel	Rata-Rata	Standar Deviasi	Observasi
1	Belanja Daerah	6.0886	.96171	7
2	Pertumbuhan Ekonomi	12.1010	.11966	7

Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	55.194	37.547	
Belanja Daerah	-4.058	3.103	-.505

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

No	Variabel	Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Daerah
1	Pearson Correlation		
	a. Pertumbuhan Ekonomi	1	-.505
	b. Belanja Daerah	-.505	1
2	Model		
	a. Koefisien Korelasi (R)	.505	
	b. Koefisien Determinasi (R ²)	.255	
	c. Koefisien Determinasi Adjusted	.106	

Hasil Perhitungan Nilai t-hitung

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.194	37.547		1.470	.202
Belanja Daerah	-4.058	3.103	-.505	-1.308	.248

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Sumbawa dari tahun 2015-2019 adalah rendah sekali atau bersifat instruktif. Yaitu sebesar 17,25% sedangkan Derajat otonomi fiskal (DOF) secara rata-rata masih kurang yaitu sebesar 10,47% yang artinya bahwa pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus lebih mengoptimalkan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian fiskal secara lebih efektif dengan memanaj pembelanjaan daerah secara optimal. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data time series 2012-2018 menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh nyata (negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Sumbawa terutama dalam aspek pengeluaran/belanja pemerintah daerah belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

Analisis Belanja Daerah

Tahun	Anggaran/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	929.427.076.837,05	879.533.564.775,87	94,63
2013	1.030.824.626.109,47	944.772.342.097,41	91,65
2014	1.203.040.306.863,04	1.064.752.018.739,00	88,51
2015	1.453.094.563.369,00	1.329.968.305.103,51	91,53
2016	1.574.053.964.184,77	1.485.764.542.537,79	94,39
2017	1.830.671.897.441,58	1.730.576.904.223,74	94,53
2018	1.773.892.233.379,61	1.684.211.294.640,21	94,94

Sumber: BPS Kab.Sumbawa, 2020.

**Belanja Modal Kabupaten Sumbawa
Tahun 2012-2018**

No.	Tahun	Belanja Modal (Rp)	Perkembangan Belanja Modal (%)
1.	2012	156.435.593.668,00	-
2.	2013	164.321.090.732,47	5,04 %
3.	2014	203.901.420.955,00	24,08 %
4.	2015	260.600.376.394,00	27,80 %
5.	2016	286.524.913.396,00	9,94 %
6.	2017	405.536.014.371,00	41,53 %
7.	2018	322.613.421.606,22	-20,45 %

Sumber: BPS Kab.Sumbawa, 2020.

**Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2012-2018**

No.	Tahun	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Perkembangan Belanja Bantuan Keuangan (%)
1.	2012	31.037.204.028,57	-
2.	2013	32.215.876.206,28	3,79%
3.	2014	38.102.714.336,00	18,27%
4.	2015	137.497.608.278,03	260,86%
5.	2016	216.935.946.420,00	57,77%
6.	2017	282.672.842.000,00	30,30%
7.	2018	258.876.015.748,00	-8,41%

Sumber: BPS Kab.Sumbawa, 2020.

**Rasio Efisiensi APBD Kabupaten Sumbawa
Tahun 2015-2019**

Tahun	Belanja daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria rasio
2015	1.329.968.305.103,51	1,307,113,124,030.40	101,74	Tidak efisien
2016	1.485.764.542.537,79	1,526,355,151,256.80	97,34	Kurang Efisien
2017	1.730.576.904.223,74	1,675,057,372,641.27	103,32	Tidak efisien
2018	1.684.211.294.640,21	1,604,617,445,655.24	104,96	Tidak efisien
2019	1.834.148.874.114,43	1,782,120,347,895.91	102,91	Tidak efisien

Berdasarkan hasil analisis data di atas menggambarkan bahwa Pertumbuhan Belanja daerah Kab. Sumbawa sebesar Rp.1.399.286.381.169,22 dan realisasinya rata-rata sebesar Rp.1.302.796.996.016,79 atau 93,10%. Peningkatan belanja daerah dari tahun ke tahun disebabkan oleh jumlah pendapatan transfer, PAD dan Dana Alokasi Khusus. Besarnya Belanja modal yang kurang dari 50% dan belanja bantuan keuangan yakni rata-rata 50% mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Sumbawa setidaknya mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset daerah (Widiasih dan Gayatri, 2017).

Namun hal ini tidak sejalan dengan besarnya pembelanjaan yang dikeluarkan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa secara mandiri masih tergantung pada pemerintah pusat yakni terlihat dari Persentase kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun dari 2015-2019 adalah rendah sekali atau bersifat instruktif. Sedangkan Derajat otonomi fiskal (DOF) secara rata-rata masih kurang yaitu sebesar 10,67% yang artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa harus lebih mengoptimalkan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian fiskal secara lebih efektif dengan mengatur dan mengelola pembelanjaan daerah secara optimal. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data time series 2012-2018 menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh nyata (negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Sumbawa terutama dalam aspek pengeluaran/belanja pemerintah daerah belum mampu secara signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019 dari segi pertumbuhannya masih tergolong tinggi. Hal ini sejalan dengan besarnya tingkat rata-rata pertumbuhan yang tergolong positif yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, namun jika ditinjau dari segi rasio kemandirian daerah Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali/instruktif serta rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong kurang.
2. Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019 dari segi realisasi pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan. Besarnya belanja modal dan belanja bantuan keuangan yang diperoleh mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumbawa setidaknya mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun kenaikan belanja daerah tersebut jika dilihat dari rasio efisiensi yaitu tergolong tidak efisien.
3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh nyata (negatif) terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Meskipun PDRB Kabupaten Sumbawa berada di atas rata-rata namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

REFERENSI

- BPS. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa 2012-2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah). 2015-2019.
- Dewi, R & Susana. (2010). *Trips dan Trik Mengkritisi APBD*. Panduan Praktis Analisa APBD. Pusat Analisis dan Telaah Regional (PATTIRO). Jakarta.
- Febliin, A & Yulitiawati. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Oku Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Mahmudi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*. Jogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soengkowo, B. (2020). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara). *Capacity Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi – Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7 No.1 Maret; P 81-92
- Tim FE-UAD, BPK Perwakilan III Yogyakarta, Partnership for Governance reform in Indonesia. (2003). Modul Pelatihan Kinerja Pemerintah Daerah. FE-UAD, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Hasil Amandemen 4, Penjelasan Umum
- Widiasih, N. N & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3, p. 2143-2171, Mar. 2017.
- Zahari, M. MS. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), Maret 2020: 149-153.